



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - h. Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
 - i. Pemberian dukungan administrasi bagi Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	a. Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disetujui Presiden	<p>IKU mengukur kinerja Deputi Bidang Administrasi dalam pemberian dukungan teknis, dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.</p> <p>Disetujui Presiden berarti: Rancangan Keputusan Presiden ditandatangani dan ditetapkan.</p> <p>Berkualitas berarti: Telah lolos skrining Badan Intelijen Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disetujui Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Rekapitulasi data Rancangan Keppres PERIODE PELAPORAN : Triwulan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat	<p>IKU mengukur kinerja Deputi Bidang Administrasi dalam pemberian dukungan teknis, dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.</p> <p>Akurat berarti: Tidak terdapat kesalahan dalam pengajuan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir kepada Presiden.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang tidak dilakukan perbaikan}}{\text{Jumlah Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada K/L}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Output</i> kendali tinggi SUMBER DATA : Rekapitulasi surat permohonan perbaikan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir PERIODE PELAPORAN : Triwulan
2.	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	a. Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	IKU menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Deputi Bidang Administrasi berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pemberian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi melalui survei. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil survei PERIODE PELAPORAN : Semesteran

b. Opini...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan										
		b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet	<p>Mengukur pencapaian kinerja Deputy Bidang Administrasi baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Realisasi diukur berdasarkan Opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan ketentuan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kriteria Opini</th><th>Persentase Realisasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wajar Tanpa Pengecualian</td><td>100%</td></tr><tr><td>Wajar Dengan Pengecualian</td><td>80%</td></tr><tr><td>Tidak Wajar</td><td>60%</td></tr><tr><td>Tidak Memberikan Opini</td><td>40%</td></tr></tbody></table> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : LHP atas LK Sekretariat Kabinet PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>	Kriteria Opini	Persentase Realisasi	Wajar Tanpa Pengecualian	100%	Wajar Dengan Pengecualian	80%	Tidak Wajar	60%	Tidak Memberikan Opini	40%
Kriteria Opini	Persentase Realisasi												
Wajar Tanpa Pengecualian	100%												
Wajar Dengan Pengecualian	80%												
Tidak Wajar	60%												
Tidak Memberikan Opini	40%												
		c. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).</p>										

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan																								
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi diukur berdasarkan predikat hasil penilaian AKIP yang diberikan Kementerian PANRB terhadap AKIP Sekretariat Kabinet, dengan persentase realisasi mengikuti skor penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table> <p>SATUAN PENGUKURAN : Nilai KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Surat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Sekretariat Kabinet dari Menteri PANRB PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																									
A	>80-90	Memuaskan																									
BB	>70-80	Sangat Baik																									
B	>60-70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30-50	Kurang																									
D	0-30	Sangat Kurang																									

d. Indeks...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan																								
		d. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi diukur berdasarkan hasil penilaian RB yang diberikan Kementerian PANRB, dengan persentase realisasi sama dengan total skor penilaian yang terdiri dari nilai pengungkit dan nilai hasil. Persentase realisasi mengikuti skor penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table> <p>SATUAN PENGUKURAN : Nilai KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Surat LHE RB Sekretariat Kabinet dari Menteri PANRB PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																									
A	>80-90	Memuaskan																									
BB	>70-80	Sangat Baik																									
B	>60-70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30-50	Kurang																									
D	0-30	Sangat Kurang																									

e. Hasil...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan												
		e. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian atas komponen pengungkit dan komponen hasil yang dilakukan oleh Tim Asessor yang dikoordinasikan Inspektorat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan hasil PMPRB Sekretariat Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Nilai KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil <i>Quality Assurance</i> PMPRB dari Inspektorat PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>												
		f. Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik	<p>IKU mengukur keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan data dan informasi publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.</p> <p>Pengukuran keberhasilan berdasar formulasi perhitungan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP) atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Skor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Informatif</td><td>90-100</td></tr><tr><td>Menuju Informatif</td><td>80-89,9</td></tr><tr><td>Cukup Informatif</td><td>60-79,9</td></tr><tr><td>Kurang Informatif</td><td>40-59,9</td></tr><tr><td>Tidak Informatif</td><td>0-<40</td></tr></tbody></table>	Kategori	Skor	Informatif	90-100	Menuju Informatif	80-89,9	Cukup Informatif	60-79,9	Kurang Informatif	40-59,9	Tidak Informatif	0-<40
Kategori	Skor														
Informatif	90-100														
Menuju Informatif	80-89,9														
Cukup Informatif	60-79,9														
Kurang Informatif	40-59,9														
Tidak Informatif	0-<40														

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Nilai KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil Monev dari Komisi Informasi Pusat PERIODE PELAPORAN : Tahunan

B. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Tugas : Memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta dukungan teknis dan administrasi keuangan lainnya;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;
 - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - d. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. Penyiapan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, pemantauan, evaluasi, dan revisi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet, revisi rencana kerja, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet;
 - h. Pelaksanaan administrasi Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-11-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet berdasarkan tingkat kepuasan unit kerja internal Sekretariat Kabinet yang menerima layanan Biro Perencanaan dan Keuangan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan Layanan Perencanaan dan Penganggaran PERIODE PELAPORAN : Semesteran</p>
2.	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	a. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<p>IKU digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja layanan manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat mendukung perolehan Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan yang tidak sesuai SAP, dengan ukuran realisasi sebagai berikut:</p>

Jumlah...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA

-12-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan																								
			<table border="1" data-bbox="1298 557 2170 805"> <thead> <tr> <th>Jumlah Temuan</th> <th>Persentase Realisasi</th> <th>Jumlah Temuan</th> <th>Persentase Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>100%</td> <td>13-15</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>1-3</td> <td>90%</td> <td>16-18</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>4-6</td> <td>80%</td> <td>19-21</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>7-9</td> <td>70%</td> <td>22-24</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>10-12</td> <td>60%</td> <td>>25</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1298 824 2270 1024"> SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet PERIODE PELAPORAN : Tahunan </p>	Jumlah Temuan	Persentase Realisasi	Jumlah Temuan	Persentase Realisasi	0	100%	13-15	50%	1-3	90%	16-18	40%	4-6	80%	19-21	30%	7-9	70%	22-24	20%	10-12	60%	>25	10%
Jumlah Temuan	Persentase Realisasi	Jumlah Temuan	Persentase Realisasi																								
0	100%	13-15	50%																								
1-3	90%	16-18	40%																								
4-6	80%	19-21	30%																								
7-9	70%	22-24	20%																								
10-12	60%	>25	10%																								
		b. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	<p data-bbox="1298 1063 2307 1162"> IKU mengukur kualitas penyelenggaraan layanan keuangan guna terciptanya kelancaran pelaksanaan fungsi keuangan dan terhindar dari kesalahan yang material. </p> <p data-bbox="1298 1175 2307 1274"> Akurat berarti: Tidak terdapat kesalahan dalam Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan. </p> <p data-bbox="1298 1287 2307 1455"> Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat}}{\text{Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan}} \times 100\%$ </p>																								

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan															
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Output</i> kendali tinggi SUMBER DATA : Dokumen Surat Perintah Membayar PERIODE PELAPORAN : Bulanan															
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>IKU IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana dan taat pada ketentuan yang berlaku serta menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran Sekretariat Kabinet yang optimal.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Rentang Nilai IKPA</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Nilai IKPA \geq 95</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2.</td><td>89 \leq nilai IKPA < 95</td><td>Baik</td></tr><tr><td>3.</td><td>70 \leq nilai IKPA < 89</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>4.</td><td>Nilai IKPA < 70</td><td>Kurang</td></tr></tbody></table>	No.	Rentang Nilai IKPA	Predikat	1.	Nilai IKPA \geq 95	Sangat Baik	2.	89 \leq nilai IKPA < 95	Baik	3.	70 \leq nilai IKPA < 89	Cukup	4.	Nilai IKPA < 70	Kurang
No.	Rentang Nilai IKPA	Predikat																
1.	Nilai IKPA \geq 95	Sangat Baik																
2.	89 \leq nilai IKPA < 95	Baik																
3.	70 \leq nilai IKPA < 89	Cukup																
4.	Nilai IKPA < 70	Kurang																

Penilaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA

-14-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan			
			Penilaian IKPA terdiri dari 3 Aspek Pengukuran dan 8 Indikator Kinerja yaitu:			
No.	Aspek Pengukuran	Indikator Kinerja	Bobot			
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10%			
		Deviasi Hal III DIPA	10%			
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20%			
		Belanja Kontraktual	10%			
		Penyelesaian Tagihan	10%			
		Pengelolaan UP dan TUP	10%			
		Dispensasi SPM	5%			
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25%			
			Total	100%		
SATUAN PENGUKURAN			: Persen			
KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI			: <i>Outcome</i> antara			
SUMBER DATA			: <i>Online Monitoring</i> -Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)			
PERIODE PELAPORAN			: Tahunan			

3. Meningkatnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	a. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	<p>IKU digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei Dokumen yang diukur antara lain: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran PERIODE PELAPORAN : Semesteran</p>
		b. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	<p>IKU digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan atas layanan revisi anggaran berdasarkan tingkat kepuasan unit kerja internal Sekretariat Kabinet yang mengajukan revisi.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan Layanan Revisi Anggaran dan Pemanfaatan Laporan/Dokumen PERIODE PELAPORAN : Semesteran</p>



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

1. Nama Organisasi : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. Pengolahan data dan informasi kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - d. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
 - e. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - h. Pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-17-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	<p>IKU mengukur kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir.</p> <p>Kriteria rancangan Keppres yang berkualitas berarti: telah lolos <i>screening</i> BIN, lolos <i>screening</i> PPAATK, dan sebagainya.</p> <p>Tepat waktu berarti: Penyelesaian rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diajukan kepada Presiden dilaksanakan sesuai SOP.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Output</i> kendali tinggi SUMBER DATA : Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir PERIODE PELAPORAN : Triwulanan
2.	Meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase kepuasan layanan kepegawaian	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas kualitas pengolahan data dan informasi kepegawaian, perencanaan dan pengadaan, serta penatausahaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil survei terkait dengan kepuasan layanan kepegawaian PERIODE PELAPORAN : Tahunan

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	<p>IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil survei terkait dengan kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>
		c. Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	<p>IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan layanan pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil survei terkait dengan kepuasan layanan pembinaan pegawai PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>

d. Indeks...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		d. Indeks Sistem Merit	<p>Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Tujuan penilaian untuk memastikan kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah berjalan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi kinerja berdasarkan nilai Indeks hasil verifikasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Indeks KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : Hasil penilaian dari KASN PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>
		e. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	<p>IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN diperoleh melalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro SDMOT dan secara teknis dilaksanakan oleh BKN.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Nilai IP ASN diperoleh dari penjumlahan nilai tiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing.</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Nilai KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : Hasil pengukuran IP ASN dari BKN PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Meningkatnya efektivitas manajemen organisasi dan tata laksana	a. Nilai evaluasi kelembagaan	<p>IKU digunakan untuk mengukur efektivitas penataan kelembagaan Sekretariat Kabinet sesuai dengan Permen PANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Peringkat komposit evaluasi kelembagaan</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Nilai KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : Hasil survei terkait dengan penilaian atas efektivitas kelembagaan PERIODE PELAPORAN : Paling singkat 3 tahun sekali dilakukan evaluasi kelembagaan</p>
		b. Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	<p>IKU digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan penilaian atas pelaksanaan SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil survei terkait dengan penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>

c. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		c. Persentase produk hukum yang diselesaikan secara akurat	<p>IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyusunan produk hukum baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Akurat berarti: Tidak dilakukan perbaikan teknis, misalnya kesalahan penulisan pasal rujukan, kesalahan penulisan nomenklatur jabatan dalam surat keputusan, setelah penetapan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah produk hukum yang tidak dilakukan perbaikan setelah penetapan}}{\text{Jumlah produk hukum yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Output</i> kendali tinggi SUMBER DATA : Produk hukum PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>
		d. Persentase kepuasan terhadap layanan bantuan hukum	<p>IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p> <p>Responden adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil survei terkait dengan kepuasan terhadap layanan bantuan hukum PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>

D. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Nama Organisasi : Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. Penyelenggaraan perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
 - d. Pengembangan sistem manajemen kinerja;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - h. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - i. Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
 - j. Penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-24-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	a. Jumlah unit kedeputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori A	IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah unit Eselon I yang hasil evaluasi SAKIP-nya mendapat kategori minimal "A". SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : LHE Inspektorat PERIODE PELAPORAN : Tahunan
		b. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	IKU digunakan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Hasil survei PERIODE PELAPORAN : Semesteran

c. Jumlah...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		c. Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet melalui peningkatan hasil penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat.</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Komponen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PANRB PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>
		d. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Laporan Hasil Survei PERIODE PELAPORAN : Semesteran</p>

2. Terselenggaranya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	<p>IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas layanan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan melalui pengukuran tingkat kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Laporan Hasil Survei PERIODE PELAPORAN : Semesteran</p>

E. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM

1. Nama Organisasi : Biro Umum
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan barang, bangunan, kendaraan, alat pengolah data, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - b. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - c. Pengelolaan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - e. Pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Penyiapan perlengkapan dan jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-28-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pengadaan, barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	a. Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kualitas layanan Biro Umum terkait pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, serta pelayanan umum lainnya melalui pengukuran tingkat kepuasan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pelayanan (kinerja) yang dilakukan oleh Biro Umum. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : Laporan Hasil Survei PERIODE PELAPORAN : Semesteran
		b. Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mengukur performa pengelolaan aset bagi suatu K/L sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Parameter penilaian IPA mencakup keseluruhan proses dalam siklus pengelolaan BMN (perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan). Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi adalah Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset oleh Kementerian Keuangan SATUAN PENGUKURAN : Indeks KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : Hasil penilaian Pengelolaan Aset Tahunan dari Kementerian Keuangan PERIODE PELAPORAN : Tahunan

c. Indeks...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-29-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		c. Indeks Tata Kelola Pengadaan	<p>IKU digunakan untuk mengukur tata kelola pengadaan berdasarkan pemanfaatan sistem pengadaan, kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ di Sekretariat Kabinet. Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan suatu standar pengukuran/nilai terhadap tata kelola pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi adalah Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Indeks KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : Hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan dari LKPP</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Tahunan</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG